

## PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Nabila Zahrotun Nikmah<sup>1</sup>; Umaimah<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia<sup>1,2</sup>  
Email : nnabilazn6@gmail.com<sup>1</sup>; umaimah@umg.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Pengkajian ini bertujuan guna mengidentifikasi hubungan antara kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, penerapan sanksi perpajakan serta akuntabilitas pelayanan publik. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ialah aspek pokok untuk penerimaan pajak daerah di Indonesia, yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan pengetahuan perpajakan. Selain itu, akuntabilitas dalam pelayanan publik dan penerapan sanksi perpajakan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan tersebut. Pengkajian ini berpendekatan kuantitatif, yang menghimpun datanya dari survei. Di inginkan pengkajian ini hasilnya bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana keempat faktor tersebut bisa mengembangkan ketaatan pajak serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang peraturan perpajakan yang adil.

Kata kunci : Pengetahuan Perpajakan; Kesadaran Wajib Pajak; Akuntabilitas Pelayanan Publik; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; Kendaraan Bermotor

### ABSTRACT

*This research is targeted at observing each variable that is used as a topic of discussion for analysis. The level of compliance of each individual with motorbike tax is something that hinders the income of the Indonesian state. This compliance is assumed to be influenced by each actor's awareness of the meaning of the tax sector. Motorized taxpayer compliance can be raised with the implementation of suitable tax penalties and public service accountability. This study employs a quantitative methodology, utilizing data gathered via surveys from samples of motorized taxpayers in certain regions. It is expected that the study's conclusion will clarify how the four components help motorized taxpayers comply more often and act as a manual for local governments developing fair tax legislation.*

*Keywords : Tax Knowledge; Taxpayer Awareness; Public Service Accountability; Tax Sanctions; Taxpayer Compliance; Motor Vehicles*

### PENDAHULUAN

Pajak ialah pendorong pokok pembangunan suatu negara, terutama di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pajak merupakan sumber pendanaan yang signifikan bagi pembangunan nasional. Proses pengembangan akan terhambat jika pendapatan pajak di bawah ideal. Meningkatkan pendapatan pajak secara efektif membutuhkan partisipasi aktif dari pembayar pajak dan pemerintah

(Amalia et al., 2023). Di Indonesia, PKB berkontribusi yang signifikan pada penghasilan daerah. Pada dasarnya konsumsi publik yang besar, terutama pada kendaraan bermotor, mungkin disebabkan oleh populasi yang sangat besar. Pemilik kendaraan bermotor bertanggung jawab untuk membayar pajak, dan jika pemilik memiliki banyak kendaraan, beban pajak akan meningkat. Pajak berperan utama bagi operasional negara sebab berupa sumber pendanaan segala pengeluaran, termasuk pembangunan. Salah satu pendapatan utama bagi pemerintah dalam membiayai pembangunan dan penyediaan pelayanan publik. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, potensi penerimaan pajak dari sektor ini semakin besar.

Pengetahuan perpajakan merupakan komponen penting untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak. Jika pembayar pajak mengetahui manfaat dan aturannya, kemungkinan besar mereka akan memenuhi tanggung jawabnya. Selain itu, kesadaran wajib pajak sangat penting. Seseorang akan lebih mungkin membiayai pajaknya tepat periode apabila mereka memahami bagaimana pajak mendanai pembangunan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, ketaatan wajib pajak menambah setara atas banyaknya wawasan yang dimiliki (Pandya & Hidayat, 2020). Demikian, masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak.

Akuntabilitas dalam pelayanan publik sama pentingnya. Wajib pajak akan lebih tergerak untuk memenuhi tugas mereka jika layanan publik transparan, cepat, dan mudah diakses. Menurut penelitian oleh (Dewi & dkk, 2020) bahwa kepatuhan pembayar pajak dalam memenuhi persyaratan pembayaran pajak mereka secara signifikan dipengaruhi oleh layanan yang diberikan petugas. Akibatnya, petugas diharapkan untuk terus-menerus memperlakukan pembayar pajak dengan kesopanan, kesetaraan, dan ketegasan dan untuk dapat menginformasikan kepada publik tentang pentingnya tanggung jawab pajak.

Sanksi perpajakan memainkan peran besar dalam meningkatkan kesadaran pembayar pajak tentang perlunya mematuhi undang-undang pajak. Sanksi yang ketat tetapi adil dapat diterapkan pada pembayar pajak yang melanggar peraturan untuk memiliki dampak pembelajaran yang positif. Namun, bagaimana sanksi diterapkan di lapangan memiliki dampak langsung pada tingkat keberhasilannya. Wajib pajak mungkin kurang cenderung mengikuti aturan jika sanksi diterapkan secara tidak konsisten atau memiliki kecenderungan untuk bias. Menurut pengkajian yang

dilaksanakan (Prameswari et al., 2021) menjabarkan bila hukuman pajak yang dikenakan sudah selaras dari kebijakan guna mendukung tiap orang membiayai PKB-nya. Jumlah Wajib Pajak yang lalai bisa dikurangi melalui sanksi perpajakan. Menurut (Nandyadini et al., 2024) bahwa pemerintah menggunakan sanksi pajak sebagai tindakan pencegah untuk memastikan bahwa wajib pajak berhenti melanggar undang-undang perpajakan.

Menentukan pemahaman masyarakat umum terhadap undang-undang perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, sanksi perpajakan, serta pengetahuan pajak untuk rangka memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor merupakan tujuan dari penelitian ini. Seiring meningkatnya tuntutan pemenuhan kewajiban PKB. Pengkajian ini bisa membantu pemerintah daerah membuat undang-undang pajak yang lebih efisien.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Theory of Planned Behavior**

Theory ini ialah niat tiap individu guna bertindak yang didampaki dari norma subjektif, sikap serta perilaku terkait kepatuhan mereka. Menurut pandangan ini, ketiga elemen ini dapat mempengaruhi niat seseorang. Adapun pendapat menurut (Adnyana et al., 2023) Theory of Planned Behavior mengarah ke dampak pengendalian perilaku pada pencapaian tujuan perilaku. Ketika seseorang ingin mencoba perilaku tertentu, mereka akan menahan diri dengan mempertimbangkan pertimbangan praktis. Secara alami, ide ini terkait dengan persepsi seseorang tentang kapasitas seseorang untuk mengatur perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut penelitian sebelumnya oleh (Aisyah et al., 2023) menunjukkan bahwa niat membayar pajak mempengaruhi perilaku mereka. Sikap membayar pajak yang dihasilkan dari kepercayaan mereka dalam kepatuhan pajak kendaraan bermotor mempengaruhi munculnya niat untuk berperilaku. Keyakinan ini mencakup pemahaman, keyakinan, dan keahlian pembayar pajak mengenai penerapan undang-undang pajak yang relevan.

### **Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pengetahuan pajak dapat meningkatkan ketaatan pembayaran pajak di negara berkembang membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang pajak. Pengetahuan yang lebih besar tentang pedoman pembayaran pajak dan penalti untuk keterlambatan

pembayaran bisa mengembangkan rasa sadar pembayar pajak serta mendukung ketaatan terhadap undang-undang pajak. Berdasarkan pengkajian yang dilaksanakan (Tumanduk et al., 2021) dapat di simpulkan bila pengetahuan pajak dengan signifikan mempengaruhi serta mengembangkan ketaatan pembayar PKB, mengharuskan mereka untuk melunaskan PKB dengan lebih teliti. Penelitian sebelumnya oleh (Pagiu et al., 2024) bahwa pengetahuan perpajakan pemahaman pembayar PKB mengenai prosedur tanggal jatuh tempo, pembayaran serta fungsi pajak secara signifikan terkait dengan pengetahuan pajak mereka. Menurut penelitian ini, semakin banyak informasi pengetahuan perpajakan tentang undang-undang pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk bertindak dengan tepat dan memenuhi tanggung jawab pajak mereka. Terbukti dari temuan penelitian sebelumnya bahwa basis pengetahuan individu memengaruhi kemampuan mereka untuk mematuhi persyaratan pembayar PKB secara lebih baik.

#### **Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Kesadaran pembayar pajak mengacu pada pengetahuan individu tentang tugas mereka guna melunaskan pajaknya selaras dengan hukum yang relevan. Pembayar pajak akan menjadi lebih sadar akan betapa pentingnya pembayaran pajak untuk mendanai penciptaan dan penyampaian layanan publik. Mereka lebih cenderung mengambil tindakan proaktif ketika memenuhi tanggung jawab pajak mereka, termasuk melunaskan PKB. Sebab mereka lebih sadar akan keuntungan pembiayaan pajak tepat waktu serta konsekuensi hukumnya, pembayar pajak yang sadar akan pajak kendaraan bermotor lebih cenderung mematuhi. Menurut penelitian sebelumnya oleh (Widiastuti et al., 2024) Menurut penelitian sebelumnya, Hal ini terutama berlaku ketika ada masalah dengan korupsi pembayaran pajak, yang dapat menurunkan kesadaran pembayar PKB. Pengkajian (Isnaini et al., 2021) menampilkan bila ketaatan pembayar PKB dengan signifikan positif didampaki atas pengetahuan. Taraf ketaatan pembayar pajak menambah setara dengan meningkatnya kesadaran mereka. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah bahwa pengetahuan pembayar pajak mempengaruhi kepatuhan pembayar PKB. Seperti pengkajian yang dilaksanakan (Diah et al., 2020) sejalan dengan pengkajian sebelumnya bahwa mendukung temuan kesadaran seseorang berdampak positif.

## **Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Akuntabilitas layanan publik memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada penyedia layanan publik dalam pelaksanaan kewajiban mereka, termasuk layanan perpajakan. Akuntabilitas dalam layanan publik terkait pajak, termasuk pembayaran pajak kendaraan, akan memberi pembayar pajak jaminan dan kepercayaan yang lebih besar dalam memenuhi komitmen pajak mereka. Akuntabilitas ini mencakup sejumlah elemen, termasuk prosedur yang terbuka dan jujur, informasi yang tidak ambigu, dan penyelesaian yang cepat dari keluhan pembayar pajak. Menurut penelitian sebelumnya oleh (Anto et al., 2020) bahwa akuntabilitas layanan publik yang ditingkatkan, termasuk prosedur yang lebih baik dan keterbukaan informasi, dapat meningkatkan kepatuhan wajib PKB.

### **Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pemerintah menggunakan sanksi pajak untuk menegur pembayar pajak yang mengabaikan undang-undang pajak, seperti yang berhubungan atas pembayaran PKB. Karena hukuman ini, pembayar pajak akan lebih cenderung membayar pajak mereka tepat waktu untuk mencegah pengeluaran lebih lanjut dari pelanggaran. Hasil pengujian menurut (Wahyuddin et al., n.d.) menurut hasil pengujian, hukuman pajak bisa meninggikan taraf ketaatan pembayar pajak bermotor. Sanksi pajak yang ketat dapat menyebabkan kerugian pembayar pajak semakin meningkat, yang dapat membuat mereka lebih cenderung mematuhi tugas pajak mereka. Kepatuhan pembayar pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi tanggung jawab mereka akan dipengaruhi oleh pilihan metode yang efisien dan sukses dalam menegakkan sanksi pajak. Pengkajian yang dilaksanakan (Masur & Rahayu, 2020) sanksi berdampak dominan signifikan pada ketaatan wajib pajak PKB. Berikutnya pengkajian dari (Sabtiharini & Ismawati, 2020) sanksi perpajakan berdampak signifikan pada wajib PKB.

### **Hipotesis Penelitian**

H1 : Pengetahuan wajib pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2 : Kesadaran wajib pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3 : Akuntabilitas pelayanan publik berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H4 : Sanksi perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### METODE PENELITIAN

Pengkajian ini berjenis survei dengan metode kuantitatif. Respondennya ialah Wajib PKB di Kota Gresik dengan total 100 orang. Yang telah diperoleh dari jumlah populasi 831.844 kendaraan bermotor yang terverifikasi di Samsat Gresik. Cara menentukannya secara memakai Rumus Slovin. Rumus Slovin yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menentukan berapa banyak responden yang harus diambil agar hasil penelitian dapat mewakili masyarakat, merupakan suatu teknik untuk menghitung besarnya sampel suatu populasi dengan tingkat kesalahan yang diinginkan.

$$\text{Rumus Slovin } n = \frac{N}{1 + Nx e^2}$$
$$n = \frac{831.844}{1 + 831.844 \times 0,1^2} = 99,98 \text{ Dibulatkan menjadi } 100 \text{ Sampel}$$

Keterangan

N = Total Sampel	= 831.844
n = Total Populasi	= 831.844
e = Tingkat Kesalahan	= 1 % / 0,01 <sup>2</sup>

### Teknik Pengumpulan Data

Pengkajian ini memakai data primer. Misalnya, statistik tentang peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor serta pajak yang terverifikasi di Samsat Gresik. Metode survei digunakan untuk memperoleh data untuk penelitian ini. Kuesioner didistribusikan kepada responden oleh para peneliti untuk melakukan survei. Peneliti menggunakan metode survei untuk mengetahui data dengan mengajukan pertanyaan tertulis dan lisan kepada responden. Skala Likert yang digunakan yaitu (1) Sangat Tidak Setuju (STS), (2) Tidak Setuju (TS), (3) Setuju (S), (4) Sangat Setuju (ST) dipakai dalam pembuatan kuesioner untuk mengevaluasi pendapat, sikap, serta preferensi pribadi mengenai topik yang dipilih peneliti. Dengan bantuan IBM SPSS 25 atau perangkat lunak statistik yang setara, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode statistik regresi linier berganda. Target analisisnya guna menentukan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Target surveinya guna menentukan bagaimana kepatuhan wajib PKB melihat variabel penelitian. Dengan

memeriksa indikator variabel, pengkajian ini dapat memastikan bagaimana faktor-faktor ini dan variabel lainnya.

Berdasarkan indikator kuesioner yang dipakai untuk pengkajian ini diadopsi dan dikembangkan dari beberapa pengkajian sebelumnya.

Pengetahuan perpajakan menurut (Muhammad et al., 2023) yaitu:

1. Mengetahui kewajiban perpajakan.
2. Mengetahui rancangan pembiayaan PKB.
3. Jika terlambat membayar pajak akan dapat sanksi administrasi.
4. Mengetahui besarnya PKB yang dibayar.
5. Mengetahui batas waktu membayar PKB.

Berdasarkan Indikator dari Kesadaran Wajib Pajak menurut (Kadir et al., 2021) yaitu:

1. Dapat memahami pajak digunakan untuk dana pengeluaran pemerintahan.
2. Membayar pajak sebab pajak ialah kewajiban.
3. Mengetahui membayar pajak kendaraan bermotor untuk membantu pembiayaan daerah.
4. Mendukung peraturan perpajakan yang diterapkan pemerintah.
5. Mengerti kewajiban perpajakan perlu diselenggarakan selaras kebijakan yang ada.

Berdasarkan Indikator dari Akuntabilitas Pelayanan Publik dari asumsi (Wahyu et al., 2020) ialah:

1. Pekerja samsat mengerti kebijakan pajak yang ada.
2. Pekerja samsat siap merespon kesulitan wajib pajak secara harmonis.
3. Wajib pajak paham atas penjabaran tentang hal yang berhubungan dengan pajak yang dibagikan pekerja samsat.
4. Kenyamanan serta kebersihan gedung samsat.
5. Pekerja samsat sangat melindungi privasi.

Berdasarkan Indikator dari Sanksi Perpajakan (Natsya et al., 2019) yaitu:

1. Hukuman pajak yang ditetapkan bisa membayar pajak tepat periode.
2. Hukuman pajak dibagikan pada seseorang mesti selaras dengan ketelambatan pembiayaan.
3. Diterapkannya sanksi perpajakan perlu selaras dari kebijakan yang ada.
4. Pengenaan sanksi perlu dilaksanakan dengan tegas pada semua wajib pajak yang menyimpanginya,

5. Hukuman dibutuhkan supaya terwujud kedisiplinan untuk membiayai pajak.

Berdasarkan Indikator dari Kepatuhan Wajib Pajak (Nurfebrianti et al., 2024) yaitu:

1. Menaati kebijakan yang ada secara tidak menyimpanginya
2. Selalu teliti membiayai serta mengkalkulasi pajak selaras jumlah yang mesti dilunaskan.
3. Membiayai pajak secara tepat periode serta berupaya guna tidak telat membiayainya.
4. Membiayai PKB selaras kebijakan yang sudah ditentukan.
5. Berusaha menaati prosedur, kriteria serta menginformasikan ketika ingin membayarkan PKB.

### **HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI**

Pengkajian ini untuk kaitan negative positif antar tiap variabel merupakan tujuan dari pengkajian ini memakai analisa regresi linier berganda. Setelah itu, uji hipotesis mengevaluasi seberapa baik variabel bebas bisa menjabarkan variabel terikat secara memakai pengujian reabilitas, validitas, F simultan, t parsial, serta Koefisiensi Determinasi..

#### **Uji Validitas**

Berdasarkan data yang telah diuji validitas tiap variabelnya menghasilkan R tabel sejumlah 0,256 diasumsikan bila tiap variabel valid (Tabel ada dibawah).

#### **Uji Reabilitas**

Berdasarkan data yang telah diuji reabilitas suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 0,50 (Husein Umar, 2011:173) variabel pengetahuan perpajakan senilai 0,359 yang dimana dinyatakan reliabel karena lebih dari 0,50. Selanjutnya Cronbach's Alpha kesadaran wajib pajak mempunyai nilai 0,512 dapat dinyatakan reliabel bila lebih dari 0,50. Akuntabilitas pelayanan pajak mempunyai nilai 0,376 dinyatakan bahwa variabel ini reliabel karena lebih dari 0,50. Variabel sanksi perpajakan dapat dinyatakan reliabel karena nilai 0,535 lebih dari 0,50. Kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel nilai 0,567 diatas 0,50. Dibuat simpulan bila masing-masing variabel bisa disebut reliabel kuesioner tersebut sehingga dapat diterima untuk penelitian.

#### **Analisi Regresi Linear Berganda**

#### **Uji Koefisien Determinasi**



Berdasarkan pengujianya, dihasilkan Adjusted R Square sejumlah 0,565 simpulanya bila dampak variable dengan simultan sejumlah 56%.

### Uji Anova

Berdasarkan Analisis Output Uji F (Simultan) jika nilainya signifikan ( $<0,05$ ), maka model regresi dianggap FIT. Diasumsikan bila variable bebas berdampak signifikan pada variable terikat dengan simultan sebab bernilai sig sejumlah 0,000 ( $<0,05$ ).

### Uji t

Uji Hipotesis, atau Uji T. Kriteria untuk menguji Uji Hipotesis, atau Uji T

Kesimpulannya terdapat pengaruh yang besar jika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Bila sig tepat 0,05 maka yang menjadi pertanyaan adalah variabel bebas berdampak pada variabel terikat.

### Analisis Uji T (Uji Hipotesis)

1. Untuk X1, bernilai sig sejumlah 0,230 ( $>0,05$ ), tidak bisa diterima, dimana nilai pengetahuan perpajakan lebih besar sehingga tidak signifikan terhadap variabel Y.
2. Untuk X2, berdampak pada Y sebab bernilai sig sejumlah 0,008 ( $<0,05$ ).
3. Untuk X3, yang terkait dengan akuntabilitas pelayanan publik, memiliki pengaruh yang cukup besar pada Y sebab bernilai sig 0,062 ( $<0,05$ ).
4. Untuk X4 terkait sanksi perpajakan sejumlah 0,038 ( $<0,05$ ), simpulanya bila X4 berdampak signifikan pada Y.

### Analisis Persamaan Regresi Berganda

Persamaan Regresi yang didapatkan:

$$0,905 + 0,143X1 + 0,316X2 + 0,255X3 + 0,240X4$$

Melalui persamaan tersebut, disimpulkan bila;

1. Kepatuhan wajib PKB bila mencapai 0,905 jika nilai konstannya adalah 0,905, dengan asumsi bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pembayar pajak, tanggung jawab layanan publik, serta sanksi pajak semuanya 0 (konstan).
2. Koefisien regresi untuk nilai positif X1 (+) adalah 0,143, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib PKB menaik 0,143 sehingga pengetahuan pajak menaik sementara semua faktor lainnya tetap sama.
3. Koefisien regresi X2 positif (+) sejumlah 0,316 bila kesadaran wajib pajak meningkat lalu variabel lain tetap, diasumsikan kepatuhan wajib PKB menaik 0,316 satuan.

4. Koefisien regresi X3 positif (+) sejumlah 0,255 mengindikasikan bahwa jika akuntabilitas pelayanan publik meningkat lalu variabel lain tetap, diasumsikan kepatuhan wajib PKB naik 0,255 satuan.
5. Koefisien regresi X4 positif (+) sejumlah 0,240 menampilkan bila sanksi pajak naik lalu variabel lain tetap, diasumsikan kepatuhan wajib PKB naik 0,240 satuan.

### **Diskusi**

#### **Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Hipotesis H1 tidak berdampak sehingga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib PKB tidak banyak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak. Dinyatakan secara berbeda, dalam konteks penelitian ini, kepatuhan wajib PKB tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan pengetahuan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa, terlepas dari potensi pentingnya, pengetahuan pajak belum terbukti memiliki dampak substansial atau berarti pada kepatuhan dalam penelitian ini. Elemen lainnya, termasuk sanksi pajak, akuntabilitas layanan publik, atau kesadaran wajib pajak, bisa lebih penting.

#### **Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Pada pengkajian ini Hipotesis H2 ditolak menampilkan kesadaran wajib PKB berdampak dominan pada kepatuhan wajib PKB. Atau kata lain, ketika pembayar pajak menjadi lebih berpengetahuan, ada peluang lebih besar bahwa mereka akan memenuhi kewajiban pajak mereka. Kesadaran wajib pajak akan signifikan berdampak oleh kepatuhan wajib pajak. Selaras dari pengkajian yang dilaksanakan (Milleani & Maryono, 2022) Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan signifikan positif didampaki kesadaran pembayar pajak tersebut.

#### **Akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Ditentukan bila hipotesis H3 tidak ditolak dalam penyelidikan ini. Ini menampilkan bila akuntabilitas pelayanan publik tidak berdampak pada kepatuhan wajib PKB di tingkat signifikansi 5% (0,05). Kepatuhan wajib pajak tidak mempunyai dampak nyata pada akuntabilitas pelayanan publik pada tingkat signifikansi 5%. Dengan kata lain, meskipun jika akuntabilitas pelayanan sangat penting, dampaknya

mungkin tidak signifikan secara statistik dalam situasi khusus ini. Hasilnya selaras dari pengkajian yang dilaksanakan (Wahyuddin et al., n.d.) menampilkan bila kepatuhan wajib PKB berdampak parsial untuk akuntabilitas layanan pajak.

### **Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Pengkajian ini menampilkan bila Hipotesis H4 ditolak, menunjukkan sanksi pajak secara signifikan berdampak pada kepatuhan wajib PKB. Hasilnya menampilkan bila sanksi pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan. Memberlakukan hukuman yang ketat dan seragam dapat memotivasi orang untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka. Penelitian ini sesuai sama penelitian (Nur khasanah et al., n.d.) menunjukkan bila studi ini mendukung temuan bila sanksi pajak memiliki sedikit efek untuk kepatuhan wajib PKB. Dengan kata lain, baik peningkatan maupun penurunan sanksi yang disesuaikan kepada wajib pajak tidak memengaruhi tingkatan kepatuhan wajib PKB.

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian dan pengujian variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gresik. Menjelaskan temuan penelitian dan diskusi terkini memungkinkan kita menarik berbagai kesimpulan, seperti: Variabel X1 pengetahuan perpajakan mempunyai nilai substansial sebesar 0,230 ( $>0,05$ ), diasumsikan tidak berdampak signifikan pada Y. Dibuat simpulan X2 berdampak signifikan pada Y sebab bernilai sig sejumlah 0,008 ( $<0,05$ ). Simpulanya bila X3 berdampak dominan pada Y sebab bernilai sig sejumlah 0,062 ( $<0,05$ ). Berikutnya X4 bernilai sig sejumlah 0,038 ( $<0,05$ ), diasumsikan X4 berdampak signifikan pada Y.

### **Saran**

Dari simpulan yang sudah disampaikan, peneliti mengusulkan sebagai saranya berupa Samsat Kota Gresik akan dapat mengenakan hukuman pajak dengan tegas, adil, dan tidak memihak kepada semua orang, berdasarkan hukum dan selaras dari kebijakan pajak yang ada guna meninggikan kepatuhan wajib PKB. Kantor Samsat Gresik harus mengembangkan ketaatan wajib PKB dari sosialisasi yang menarik, kreatif, dan komprehensif untuk menjangkau semua komunitas Kota Gresik, mengingat temuan

---

penelitian yang menunjukkan bahwa pembayar pajak di Kota Gresik masih kurang memiliki pengetahuan tentang pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. K. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(3), 319–329.
- Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 53–62. <https://doi.org/10.35446/Akuntansikompetif.V6i1.1184>
- Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Durya, N. P. M. A., & Isthika, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 39–51. <https://doi.org/10.37641/Jiakes.V11i3.2211>
- Anto, L. O., Ekonomi, F., Halu, U., & Kendari, O. (2020). No Title. 5, 71–82.
- Dewi, I. A. P. P., & Dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mmembayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417–426.
- Diah, T., Program, P., Pajak, P., Bermotor, K., Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Kesadaran Wajib Pajak , Sosialisasi Pajak , Dan Pelayanan ( Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan ) Baj ( Behavioral Accounting Journal ). 3(2), 129–143.
- Isnaini, P., Kepatuhan, T., Pajak, W., & Bermotor, K. (2021). 2 1,2. 3(1).
- Kadir, M. I. S., Runtu, T., & Pontoh, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kadir, M. I. S., Runtu, T., & Pontoh, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pel. *Jurnal Emba*, 9(2), 774–784. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33742>
- Masur, C. G., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 2–17.
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kendal. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 89–98. <https://doi.org/10.51903/Kompak.V15i1.611>
- Muhammad, F. A., Suparyati, A., Gazali, M., & Octaviani, D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kota Tangerang). *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2(2), 91–107.
- Nandyadini, N., Jurnal, J., & Mea, I. (2024). Dan Tax Awareness Terhadap Tax Compliance Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Akuntansi)* 8(3), 145–160.

- Natsya, D., Pajak, P., Sanksi, D. A. N., & Natasia, D. (2019). Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2018. 6(2), 70–77.
- Nur Khasanah, W., Kendaraan, P., Di, B., & Sukoharjo, K. (N.D.). 3) 1, 2, 3). 24–34.
- Nurfebrianti, K., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Mahasiswa Bhayangkara Jakarta Raya. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1547–1559. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2432>
- Pagiu, C., Rambulangi, A. C., Kristen, U., Toraja, I., & Selatan, S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Bermotor ( Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Tana Toraja ). 4(28), 139–142.
- Pandya, D. R., & Hidayat, M. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 8(3), 1–9. <http://repository.untag-sby.ac.id/20384/84/jurnal.pdf>
- Prameswari, J. Z., Akuntansi, P. S., Tinggi, S., Ekonomi, I., Keluarga, Y., & Negara, P. (2021). Ringkasan Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana. 11–17.
- Sabtiharini, D. A., & Ismawati, K. (2020). 541-1291-1-Pb. 2(2), 32–39.
- Tumanduk, S., Kawulur, A., & Bacilius, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Samsat Kota Tomohon. 2(3), 292–301.
- Wahyu, S., Publik, P., Kepatuhan, T., Pajak, W., Bermotor, K., & Kota, D. I. (2020). No Title.
- Wahyuddin, Dan, P., & Publik, P. (N.D.). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt Bapenda Provinsi Sulsel Wilayah Pare-Pare. 28, 448–461.
- Widiastuti, S. A., Hernawati, R. I., Pamungkas, I. D., & Purwanto. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Demak. *Jemsi (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(1), 289–300. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1929>

## GAMBAR, DAN TABEL

Tabel Uji 1. Validitas  
Pengetahuan Perpajakan Correlations

		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	TTPP
PP1	Pearson Correlation	1	.076	.168	-.040	-.149	.356**
	Sig. (2-tailed)		.450	.095	.694	.138	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP2	Pearson Correlation	.076	1	.117	.215*	.078	.537**
	Sig. (2-tailed)	.450		.245	.031	.443	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP3	Pearson Correlation	.168	.117	1	.211*	.065	.637**
	Sig. (2-tailed)	.095	.245		.035	.518	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PP4	Pearson Correlation	-.040	.215*	.211*	1	.286**	.593**
	Sig. (2-tailed)	.694	.031	.035		.004	.000
	N	100	100	100	100	100	100

PP5	Pearson Correlation	-.149	.078	.065	.286**	1	.520**
	Sig. (2-tailed)	.138	.443	.518	.004		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TTPP	Pearson Correlation	.356**	.537**	.637**	.593**	.520**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Data Olahan, 2024

Tabel 2. Reliability Statistics Pengetahuan Perpajakan

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized	
	Items	N of Items
.359	.364	5

Sumber : Data Olahan, 2024

Tabel 3. Uji Validitas Kesadaran wajib pajak Correlations

		KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	TTKWP
KWP1	Pearson Correlation	1	.166	.148	-.061	.207*	.498**
	Sig. (2-tailed)		.099	.141	.544	.039	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP2	Pearson Correlation	.166	1	.134	.109	.231*	.569**
	Sig. (2-tailed)	.099		.185	.281	.021	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP3	Pearson Correlation	.148	.134	1	.367**	.298**	.695**
	Sig. (2-tailed)	.141	.185		.000	.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP4	Pearson Correlation	-.061	.109	.367**	1	.083	.487**
	Sig. (2-tailed)	.544	.281	.000		.409	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP5	Pearson Correlation	.207*	.231*	.298**	.083	1	.640**
	Sig. (2-tailed)	.039	.021	.003	.409		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TTKWP	Pearson Correlation	.498**	.569**	.695**	.487**	.640**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data Olahan, 2024

Tabel 4. Uji Reliability Statistics Kesadaran Wajib Pajak

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized	
	Items	N of Items
.512	.503	5

Sumber : Data Olahan, 2024

Tabel 5. Uji validitas

		Akuntabilitas Pelayanan Publik Correlations					
		APP1	APP2	APP3	APP4	APP5	TTAPP
APP1	Pearson Correlation	1	.183	.106	-.028	.177	.525**
	Sig. (2-tailed)		.068	.294	.784	.079	.000
	N	100	100	100	100	100	100
APP2	Pearson Correlation	.183	1	.235*	.035	.173	.632**
	Sig. (2-tailed)	.068		.019	.732	.085	.000
	N	100	100	100	100	100	100
APP3	Pearson Correlation	.106	.235*	1	.090	.046	.661**
	Sig. (2-tailed)	.294	.019		.375	.649	.000
	N	100	100	100	100	100	100
APP4	Pearson Correlation	-.028	.035	.090	1	.001	.329**
	Sig. (2-tailed)	.784	.732	.375		.991	.001
	N	100	100	100	100	100	100
APP5	Pearson Correlation	.177	.173	.046	.001	1	.475**
	Sig. (2-tailed)	.079	.085	.649	.991		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TTAPP	Pearson Correlation	.525**	.632**	.661**	.329**	.475**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Data Olahan, 2024

Tabel 6. Uji Reliability Statistics Akuntabilitas pelayanan publik

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized	
	Items	N of Items
.376	.362	5

Sumber : Data Olahan, 2024

Tabel 7. Uji Validitas Sanksi Perpajakan Correlations

		SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	TTSP
SP1	Pearson Correlation	1	.262**	.153	.024	.153	.501**
	Sig. (2-tailed)		.008	.129	.814	.129	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP2	Pearson Correlation	.262**	1	.303**	.096	.168	.604**
	Sig. (2-tailed)	.008		.002	.344	.096	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP3	Pearson Correlation	.153	.303**	1	.282**	.081	.602**
	Sig. (2-tailed)	.129	.002		.004	.425	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP4	Pearson Correlation	.024	.096	.282**	1	.447**	.631**
	Sig. (2-tailed)	.814	.344	.004		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
SP5	Pearson Correlation	.153	.168	.081	.447**	1	.648**
	Sig. (2-tailed)	.129	.096	.425	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TTSP	Pearson Correlation	.501**	.604**	.602**	.631**	.648**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	

N	100	100	100	100	100	100
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
Sumber : Data Olahan, 2024

Tabel 8. Uji Reliability Statistics Sanksi Perpajakan

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized	
	Items	N of Items
.553	.550	5

Sumber : Data Olahan, 2024

Tabel 9. Uji Validitas  
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Correlations

		KW1	KW2	KW3	KW4	KW5	TTKW
KW1	Pearson Correlation	1	.185	-.117	.073	.058	.315**
	Sig. (2-tailed)		.066	.246	.471	.567	.001
	N	100	100	100	100	100	100
KW2	Pearson Correlation	.185	1	.184	.168	.227*	.612**
	Sig. (2-tailed)	.066		.067	.094	.023	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KW3	Pearson Correlation	-.117	.184	1	.395**	.319**	.622**
	Sig. (2-tailed)	.246	.067		.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KW4	Pearson Correlation	.073	.168	.395**	1	.443**	.723**
	Sig. (2-tailed)	.471	.094	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
KW5	Pearson Correlation	.058	.227*	.319**	.443**	1	.691**
	Sig. (2-tailed)	.567	.023	.001	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TTKW	Pearson Correlation	.315**	.612**	.622**	.723**	.691**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
Sumber : Data Olahan, 2024

Tabel 10. Uji Reliability Statistics Kepatuhan  
Wajib Pajak

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized	
	Items	N of Items
.567	.545	5

Sumber : Data Olahan, 2024

Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.763 <sup>a</sup>	.583	.565	1.59608

Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Pajak

Sumber : Data Olahan, 2024

Tabel 12. ANOVA



Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	337.951	4	84.488	33.166	.000 <sup>b</sup>
	Residual	242.009	95	2.547		
	Total	579.960	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Pajak

Sumber : Data Olahan, 2024

Tabel 13. Uji t Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.905	1.486		.609	.544
Pengetahuan Perpajakan	.143	.119	.121	1.208	.230
Kesadaran Wajib Pajak	.316	.116	.295	2.725	.008
Akuntabilitas Pelayanan Pajak	.255	.135	.210	1.887	.062
Sanksi Perpajakan	.240	.114	.234	2.104	.038

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber : Data Olahan, 2024